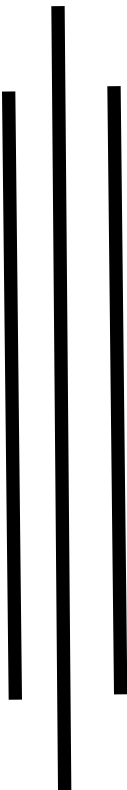


**LAPORAN KINERJA TW I
TAHUN 2024**



**KECAMATAN BERUNTUNG BARU
KABUPATEN BANJAR**

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Beruntung Baru adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Beruntung Baru. Laporan Kinerja merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah telah dilaksanakan. Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pengukuran indikator Kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian Kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran Kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijakan.

Tahapan Evaluasi Kinerja yang dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Beruntung Baru berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pelaksanaan Kinerja pada tahun 2024 Kecamatan Beruntung Baru menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 2.647.307.514,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, meliputi program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

2.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Beruntung Baru

2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Beruntung Baru
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiapbulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

2.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Beruntung Baru kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatanpada Kecamatan Beruntung Baru
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Beruntung Baru

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Laporan Kinerja kecamatan Beruntung Baru disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (tanggal 28 Desember 2023)

7. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (tanggal 28 Desember 2023)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Beruntung Baru mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Beruntung Baru mendukung pencapaian misi Kelima Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi Keempat : Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Amanah, Baik ,
Bersih dan Efektif.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Adapun Faktor yang mendukung terlaksananya IKU adalah:

1. Tersedianya Anggaran yang dipergunakan pelaksanaan Progran dan Kegiatan dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Terdapat Keselasaran antara indikator Kinerja Kegiatan dengan IKU

Sedangkan Faktor Penghambat IKU adalah:

1. Ada Beberapa Kegiatan yang Waktu Pelaksanaannya ditentukan oleh Pemerintah Daerah (Kegiatan bisa dilaksanakan atau tidak)
2. Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) akan dilakukan di akhir tahun oleh Tim Penilai EKK Tingkat Kabupaten

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Beruntung Baru Kab. Banjar tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabael 3.2 Capaian Kinerja Kec. Beruntung Baru TW I

No.	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Target	Satuan	Capaian	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi)x nilai penimbang	90	Nilai	0	0.00%
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern= Σ (Unsur kinerja utama x 40%)+(unsur kepatuhan x 30%)+(unsur Pelayanan Umum x30%)	82	Nilai	0	0.00%
3	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	JumlahDokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan x 1001%	100%	Presentase	37.50%	37.50%
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun dalam 1 tahun	15	Dokumen	8	53.33%
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dalam 1 tahun	17	Laporan	4	23.53%
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah x 100%	100%	Presentase	25.00%	25.00%
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang per bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34	orang	13	25.00%
8	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun dalam 1 tahun	39	Dokumen	9	23.08%
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan yang tersusun dalam 1 tahun	1	Laporan	1	100.00%
10	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksanan : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang direncanakan x 100%	100%	Presentase	25.00%	25.00%

11	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun dalam 1 tahun	4	Laporan	1	25.00%
12	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan: Jumlah Administrasi Kepegawaian yang direncanakan x 100%	100%	Presentase	0.00%	0.00%
13	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun dalam 1 tahun	1	Dokumen	0	0.00%
14	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam 1 tahun	3	orang	0	0.00%
15	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	100%	Presentase	17.24%	17.24%
16	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dalam 1 tahun	9	paket	0	0.00%
17	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam satu tahun	4	paket	1	25.00%
18	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dalam 1 tahun	4	paket	1	25.00%
19	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun dalam satu tahun	12	Laporan	3	25.00%
20	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan dalam 1 tahun	100%	Presentase	0.00%	0.00%
21	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dalam satu tahun	3	paket	0	0.00%
22	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersusun dalam 1 tahun	7	paket	0	0.00%
23	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan x 100%	100%	Presentase	25.00%	25.00%
24	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersusun dalam satu tahun	12	Laporan	3	25.00%
25	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersusun dalam satu tahun	12	Laporan	3	25.00%
26	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara yang dilaksanakan : Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara yang direncanakan x 100%	100%	Presentase	16.67%	16.67%
27	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam satu tahun	8	unit	8	100.00%
28	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam satu tahun	11	unit	11	100.00%
29	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dalam satu tahun	1	unit	0	0.00%
30	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	14.29%	14.29%
31	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	14.29%	14.29%
32	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tersusun dalam 1 tahun	7	Laporan	1	14.29%

		Kec					
33	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	33.33%	33.33%
34	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Keg PemberdayaanDesa	JumlahPenyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	33.33%	33.33%
35	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang tersusun dalam 1 tahun	6	LKM	6	100.00%
36	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tersusun dalam 1 tahun	3	Laporan	0	0.00%
37	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakatdi Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakatdi Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	0.00%	0.00%
38	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	0.00%	0.00%
39	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang tersusun dalam satu tahun	2	Laporan	0	0.00%
40	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam 1 tahun	1	Laporan	0	0.00%
41	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana : Total Penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	0.00%	0.00%
42	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan PeraturanPerundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 1 tahun	1	Laporan	0	0.00%
43	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%	100%	Presentase	20.00%	20.00%
44	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana : Total jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	20.00%	20.00%
45	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang MengikutiPembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersusun dalam satu tahun	90	orang	0	0.00%

46	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang tersusun dalam satu tahun	3	Laporan	1	33.33%
47	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dalam satu tahun	1	Laporan	0	0.00%
48	Terlaksananya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana : Total Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	25.00%	25.00%
49	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana : Total Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan x 100 %	100%	Presentase	25.00%	25.00%
50	Terselenggarakannya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun dalam satu tahun	1	Dokumen	0	0.00%
51	Terselenggarakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang tersusun dalam satu tahun	2	Dokumen	1	50.00%
52	Terselenggarakannya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dalam satu tahun	1	Dokumen	0	0.00%
53	Terlaksananya Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tersusun dalam 1 tahun	1	Dokumen	1	100.00%
54	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tersusun dalam 1 tahun	2	Dokumen	0	0.00%
55	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang tersusun dalam 1 tahun	1	Dokumen	0	0.00%

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulanan CAMAT - Kecamatan Beruntung Baru Periode 2022 - 2026 Tahun 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan		Tiwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
			Satuan	Target					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Persen	90	Triwulan 1	0	0	0	Faktor penghambat : Nilai akan terlihat diakhir triwulan IV Faktor pendorong : tersedia anggaran dan kordinasi antar lini yang baik

Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulanan
SEKRETARIS KECAMATAN - Kecamatan Beruntung Baru
Periode 2022 - 2026
Tahun 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan		Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
			Satuan	Target					
2	Terselenggaranya Urusan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	Persen	82	Triwulan 1	0	0	0	Faktor penghambat : Penilaian IKKI kan terlihat di triwulan ke II Faktor pendorong : Tersedia anggaran, dan kerjasama internl kantor

Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulanan
SEKSI PEMERINTAHAN - CAMAT - Kecamatan Beruntung Baru
Periode 2022 - 2026
Tahun 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan		Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Satuan	Target					
4	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	Triwulan 1	20	20	100,00	Faktor penghambat : Keuangan masih dalam Proses Pengajuan GU Faktor pendorong : tersedia anggaran Kas Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Rak dan Rencana Aksi Terlaksananya Peringatan Isro' Mi'roj Terlaksananya Safari Ramadhan
5	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa	Persen	100	Triwulan 1	22.22	22.22	100,00	Faktor penghambat : Aula Kecamatan dipakai kegiatan perseiapa dan perhitungan suara Pemilu, sehingga menyebabkan pelaksanaan Rakor BPD mundur menjadi bulan Maret Faktor pendorong : tersedia anggaran Kas Terlaksananya Rapat Penyusunan Perdes dan APBDes Terlaksananya Rakor Tugas Kepala Desa Terlaksananya Rapat BPD I

Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulanan
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - CAMAT - Kecamatan Beruntung Baru
Periode 2022 - 2026
Tahun 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan		Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Satuan	Target					
2	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan	Persentase koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan	Persen	100	Triwulan 1	25	25	100,00	Faktor penghambat : - Masih terdapat usulan kegiatan yang tidak memenuhi Readnes Criteria SKPD ----Beberapa kegiatan yang diusulkan oleh Desa tidak selaras dengan kamus usulan yang disediakan oleh SKPD -Pada triwulan I (satu) ini masih belum ada target kegiatan, karena dari 3 (tiga) target laporan yang salah satunya adalah Laporan Kegiatan PKK Kecamatan baru akan dihasilkan laporannya di Triwulan IV/ di akhir tahun, sedangkan untuk dua laporan kegiatan lainnya target dan realisasi baru ada pada triwulan II (dua) nanti, sehingga untuk subkegiatan Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan indicator sasaran Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan pada triwulan I (satu) ini realisasi masih 0% Faktor pendorong : tersedia anggaran kas Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Terlaksanya Rakor PKK Januari dan Februari

Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulanan
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN - CAMAT - Kecamatan Beruntung Baru
Periode 2022 - 2026
Tahun 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan		Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Satuan	Target					
3	Meningkatnya kordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase kordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persen	100	Triwulan 1	0	0	0.00	Faktor penghambat : Beberapa Kegiatan Realisasi Capaian Kinerjanya di Triwulan III Rapat Sosialisasi PERDA Kab Banjar dilaksanakan bulan April Rapat FKUB dilaksanakan pada bulan Juni Rapat Sosialisasi BPBD dilaksanakan di bulan Oktober Faktor pendorong : tersedia anggaran Anggaran Kas Terlaksananya Rapat Persiapan Pemilu 2024 Terlaksananya Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu 2024

Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulanan
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIS KECAMATAN - Kecamatan Beruntung Baru
Periode 2022 - 2026
Tahun 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan		Triwulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Satuan	Target					
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase administrasi kepegawaian daerah yang terpenuhi	Persen	100	Triwulan 1	75	75	100,00	Faktor penghambat : Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan di bulan april Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai pengukuran kinerja baru akan dilakukan di akhir Triwulan IV (November) sehingga pada Triwulan I ini masih belum ada pencapaian kinerja sasaran. Faktor pendorong : tersedia anaggaran Kas Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan RAK dan Rencana Aksi
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	Triwulan 1	17.24	17.24	100,00	Faktor penghambat : Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adanya kendala penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang masih dalam proses negosiasi pengadaan dengan pihak penyedia.

									Faktor pendorong : tersedia anggaran dan kordinasi yang baik
8	Tersedianya sarana da prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan daerah	Persen	100	Triwulan 1	30	0	0,00	Faktor penghambat : Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terbatasnya anggaran sehingga tidak semua barang dapat dianggarkan pemeliharaannya. Faktor pendorong : tersedia anggaran dan kordinasi yang baik
9	Terselenggaranya penunjang pelayanan umum kantor	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	Triwulan 1	25	25	100,00	Faktor penghambat : Tidak ada hambatan yang terlalu berarti secara keseluruhan lancar. Faktor pendorong : melaksanakan kegiatan sesuai anggaran kas
10	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah	Persen	100	Triwulan 1	25	25	100,00	Faktor penghambat : Faktor pendorong : tersedia anggaran dan kordinasi yang baik

Pengukuran Perjanjian Kinerja Triwulanan
SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET - SEKRETARIS KECAMATAN - Kecamatan
Beruntung Baru
Periode 2022 - 2026
Tahun 2024

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan		Tiwulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
			Satuan	Target					
11	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi SKPD	Persen	100	Triwulan 1	36.4	36.4	100,00	Faktor penghambat : DPA masih dalam proses Penandatanganan TAPD Terkendala dengan Server (Belum dibukanya akses masuk ke aplikasi baik SIPD dan Simondalev) Melakukan penyesuaian LKJIP dengan format baru Ada Beberapa Penyusunan Dokumen yang menunggu jadwal dan Pendampingan dari Instansi Terkait Adanya Format baru yang digunakan dalam penyusunan LKJ TW 1 Faktor pendorong : 1. Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Tersusunnya Dokumen IKU 3. Tersusunnya Rencana Aksi 4. Tersusunnya DPA 2024 5. Tersusunnya RKA 2025 6. Tersusunnya Tebel Keselarasan 7.Tersusunnya LKJIP 8.Tersusunnya Laporan RFK bulan Januari , Februari, Maret 9. Tersusunnya LKJ TW1 10. Melaksanakan Kegiatan Berikutnya sesuai dengan Rencana Aksi dan RAK 11. Terlaksananya Rapat Penyusunan RKA dan KAK 2025

12	Pelaksanaan penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	Triwulan 1	27.5	27.5	100,00	Faktor penghambat : 1.Terkendala Jaringan, susah masuk ke aplikasi SIPD RI, Sering Error 2.Penyusunan Lap Keuangan Masih dalam Tahap Konsultasi dan Koordinasi dengan Bidang Akuntansi 3.Laporan Keuangan Masih Tahap Review Inspektorat 4.Keuangan Masih dalam Proses Pengajuan GU Faktor pendorong : 1. Melaksanakan Kegiatan Berikutnya sesuai dengan Rencana Aksi dan RAK 2. Tersedianya Anggaran 3. Terlaksanya Gaji Jan. Februari, Maret 2024 4. Terlaksannya TPP Jan , Februari 2024 5. Terlaksananya UP, Gu1,GU2 6. Terbayarnya honorium PPTK, PPKeu, Pengurus barang, Pembantu bendahara pengeluaran, bendahara bulan Januari, Februari, Maret 7. Terlaksananya UP, GU1 dan GU2 8.Tersusunnya Laporan Keuangan
13	Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tersusun	Persen	100	Triwulan 1	25	25	100,00	Faktor penghambat : Menunggu Jadwal Rekon dan Desk RKBMD dari Bid Aset BPKPAD Keuangan Masih dalam Proses Pengajuan GU Faktor pendorong : - Adanya Pendampingan dari Bid Aset - Melaksanakan Kegiatan Berikutnya Sesuai dengan Rencana Aksi dan RAK

3. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pada tahun 2023 sesuai dengan tabel dibawah

No.	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi %	Target	Realisasi	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	90	0	0.00%	2,647,307,514	426,365,065	16.11%
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	82	0	0.00%	2,389,852,814	385,797,065	16.14%
3	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	37.50%	37.50%	5,055,000	700,000	13.85%
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	8	53.33%	3,285,000	700,000	21.31%
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	4	23.53%	1,770,000	-	0.00%
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	25.00%	25.00%	1,953,117,598	326,047,534	16.69%
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34	13	25.00%	1,912,356,598	316,237,534	16.54%
8	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39	9	23.08%	40,290,000	9,810,000	24.35%
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	1	100.00%	471,000	-	0.00%
10	Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100%	25.00%	25.00%	363,000	-	0.00%
11	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	1	25.00%	363,000	-	0.00%
13	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100%	0.00%	0.00%	30,700,000	-	0.00%

14	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	0.00%	700,000	-	0.00%
15	Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	3	0	0.00%	30,000,000	-	0.00%
16	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	17.24%	17.24%	106,032,300	18,840,860	17.77%
18	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9	0	0.00%	5,476,500	-	0.00%
20	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	1	25.00%	11,629,400	4,408,900	37.91%
21	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	1	25.00%	1,126,400	160,500	14.25%
22	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3	25.00%	87,800,000	14,271,460	16.25%
23	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	100%	30.00%	30.00%	66,368,000	-	0.00%
24	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	0	100.00%	10,644,000	-	0.00%
25	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	0	0.00%	55,724,000	-	0.00%
31	Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25.00%	25.00%	142,046,916	29,502,880	20.77%
33	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	25.00%	9,486,916	328,500	3.46%
34	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3	25.00%	132,560,000	29,174,380	22.01%
35	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	16.67%	16.67%	86,170,000	10,705,791	12.42%
36	Tertaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	8	100.00%	60,980,000	10,065,791	16.51%
37	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11	11	100.00%	7,430,000	640,000	8.61%
38	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0.00%	17,760,000	-	0.00%
39	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%	14.29%	14.29%	35,309,000	6,770,000	19.17%
40	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	14.29%	14.29%	35,309,000	6,770,000	19.17%
41	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	7	1	14.29%	35,309,000	6,770,000	19.17%
44	Tertaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kec	100%	33.33%	33.33%	33,583,300	10,302,800	30.68%
45	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Keg Pemberdayaan Desa	100%	33.33%	33.33%	33,583,300	10,302,800	30.68%
46	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	6	100.00%	7,162,800	7,152,800	99.86%
47	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	0	0.00%	26,420,500	3,150,000	11.92%
48	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100%	0.00%	0.00%	16,125,000	3,670,200	22.76%
49	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	0.00%	0.00%	12,968,000	3,670,200	28.30%
50	Tertaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2	0	0.00%	10,161,000	3,670,200	36.12%
51	Tertaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	0	0.00%	2,807,000	-	0.00%

52	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%	0.00%	0.00%	3,157,000	-	0.00%
53	Tertindakannya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	0	0.00%	3,157,000	-	0.00%
54	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	40.00%	40.00%	152,331,400	16,665,000	10.94%
55	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100%	40.00%	40.00%	152,331,400	16,665,000	10.94%
56	Tertindakannya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90	0	0.00%	33,164,000	-	0.00%
57	Tertindakannya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	1	33.33%	88,012,000	9,865,000	11.21%
58	Tertindakannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	0	0.00%	31,155,400	6,800,000	21.83%
59	Tertindakannya Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100%	25.00%	25.00%	20,106,000	3,160,000	15.72%
60	Tertindakannya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	25.00%	25.00%	20,106,000	3,160,000	15.72%
61	Terselenggarakannya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	0	0.00%	4,634,000	-	0.00%
62	Terselenggarakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2	1	50.00%	3,327,000	1,660,000	49.89%
63	Terselenggarakannya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	0	0.00%	2,777,000	-	0.00%
64	Tertindakannya Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	100.00%	1,577,000	1,500,000	95.12%
66	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2	0	0.00%	4,734,000	-	0.00%
67	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	0	0.00%	3,057,000	-	0.00%

Dari Tabel diatas ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang disebabkan oleh :

1. Capaian Kinerja Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN target 34 orang/bulan sesuai dengan hitungan Anjab, akan tetapi realisasinya hanya 13 orang saja karena adanya kekurangan pegawai khususnya untuk kasi tidak memiliki staf
2. Capaian Kinerja Tertindakannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai baru dilaksanakan di bulan November
3. Capaian Kinerja Tertindakannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan bulan April
4. Capaian Kinerja Tersedianya Mebel masih dalam proses Pengadaan Barang

5. Capaian Kinerja Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan bulan Juni
6. Capaian Kinerja Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terdapat 3 Laporan yaitu pelatihan pokja dibulan april 1 laporan , fasilitasi lomba di bulan mei 1 Laporan, dan rakor pkk yang pelaksanaan nya ada 11x sudah dilakukan 2x tapi pelaporannya ada di akhir tahun dengan hitungan 1 laporan
7. Capaian Kinerja Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan terdapat 2 laporan yaitu Rakor BPBD di bulan oktober 1 laporan, Rapat fasilitasi Pemilu dan Pilpres 2024, rapat fasilitasi pilkada, rapat pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024 dan rapat pelaksanaan pilkada, 4 kegiatan itu dijadikan dalam 1 laporan dan baru 2x dilaksanakan yaitu Rapat fasilitasi Pemilu dan Pilpres 2024 dan rapat pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024
8. Capaian Kinerja Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dilaksanakan di bulan Juni 2024
9. Capaian Kinerja Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan bulan april
10. Capaian Kinerja Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan di bulan Juli dan agustus
11. Capaian Kinerja Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan ada 12x pelaksanaan sudah dilaksanakan 3x dan pelaporannya di bulan desember dengan hitungan 1 laporan
12. Capaian Kinerja Terselenggarakannya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dilaksanakan bulan september dan oktober
13. Capaian kinerja erselenggarakannya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dilaksanakan di bulan Mei
14. Capaian kinerja Terselenggarakannya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu rakor BPD di bulan Februari dan oktober dihitung 1 laporan tapi rakor1 BPD baru dilaksanakan di bulan Maret dan Bimtek BPD di bulan Juli dengan 1 laporan
15. Capaian kinerja Terselenggarakannya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilaksanakan di bulan april.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Capaian Kinerja Per Triwulan Kecamatan Beruntung Baru Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan laporan kemajuan penyelenggaraan program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Beruntung Baru dan menjadi pemicu agar lebih meningkatkan peran aktif untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya laporan ini akan menjadi masukan penilaian kinerja pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar.

Saran-saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan BKD terkait dengan kekosongan Pejabat/Staf (Bendahara) yang disebabkan karena adanya mutasi dan Promosi di Lingkup Kab Banjar, serta adanya pejabat yang meninggal dunia
2. Diharapkan agar semua seksi berkoordinasi satu dengan yang lain dalam pemenuhan dokumen sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan tidak adanya keterlambatan dalam upload dokumen ke dalam aplikasi simondalev
3. Koordinasi Dinas terkait terkait dengan kesedian waktu narasumber
4. Koordinasi dengan Camat terkait dengan Tempat pelaksanaan kegiatan agar tidak berbenturan dengan kegiatan Pemilu atau kegiatan lain

Demikian Laporan Kinerja Triwulan I ini disusun semoga bisa menjadikan dasar perhitungan kinerja dan menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.



Beruntung Baru, 08 April 2024
Camat Beruntung Baru

WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 197108151995061001

LAMPIRAN

TABEL PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS/SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	90	Prog	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NILAI EVALUASI KECAMATAN	Nilai	90	2,647,307,514	CAMAT
						Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
						Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
						Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					
						Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
2	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern Kecamatan	Nilai	82	Prog	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Beruntung Baru	Nilai	82	2,389,852,814	SEKCAM
3	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Presentase	100%	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Presentase	100%	5,055,000	KASUBBAG RENKEU DAN ASET
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	Sub Keg	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	3,285,000	
5	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	17	1,770,000	
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100%	1,953,117,598	
7	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	34	Sub Keg	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	34	1,912,356,598	
8	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	39		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	39	40,290,000	
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	471,000	
10	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Presentase	100%	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Presentase	1	363,000	

11	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	Sub Keg	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	363,000	KASUBBAG UMPEG
12	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Presentase	100	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Presentase	100%	30,700,000	
13	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	Sub Keg	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	700,000	
14	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang MengikutiBimbingan TeknisImplementasu Peraturan Perundang-undangan	orang	3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang MengikutiBimbingan TeknisImplementasu Peraturan Perundang-undangan	orang	3	30,000,000	
15	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase	100%	106,032,300	
16	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	4	Sub Keg	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	4	5,476,500	
17	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	paket	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan	paket	4	11,629,400	
18	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	4		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	4	1,126,400	
19	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	87,800,000	
20	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Daerah	Presentase	100%	66,368,000	
21	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	Sub Keg	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	10,644,000	
22	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	55,724,000	
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100%	142,046,916	
24	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Sub Keg	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9,486,916	
25	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Laporan	12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Laporan	12	132,560,000	
26	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase	100%	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Presentase	1	86,170,000	
27	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	8	Sub Keg	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	8	60,980,000	
28	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang dipelihara	Unit	11		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang dipelihara	Unit	11	7,430,000	

29	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17,760,000	
32	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase	100%	Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase	1	35,309,000	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
33	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	Laporan	7	Sub Keg	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec	Laporan	7	35,309,000	
34	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100%	Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100%	7,162,800	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
35	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LKM	6	Sub Keg	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LKM	6	7,162,800	
36	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	26,420,500	
37	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase	100%	Kegiatan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase	100%	12,968,000	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
38	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	Sub Keg	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	10,161,000	
39	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	2,807,000	
40	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persentase	100%	Kegiatan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persentase	100%	3,157,000	
41	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	Sub Keg	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	3,157,000	
42	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase	100%	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Presentase	100%	152,331,400	KASI PEMERINTAHAN

43	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	90	Sub Keg	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	90	33,164,000	KASI PEMERINTAHAN
44	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	Sub Keg	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	88,012,000	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
45	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	Sub Keg	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	31,155,400	KASI PEMERINTAHAN
46	Terselenggarakannya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemb	Presentase	100	Kegiatan	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemb	Presentase	100%	20,106,000	
47	Terselenggarakannya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	Sub Keg	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	4,634,000	
48	Terselenggarakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2		Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	3,327,000	
49	Terselenggarakannya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	Dokumen	1		Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	Dokumen	2	2,777,000	
50	Terlaksananya Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1		Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	2	1,577,000	
51	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	2		Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	2	4,734,000	
52	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1		Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	1	3,057,000	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WAHIDIN NOOR, M.MPd.

JABATAN : CAMAT BERUNTUNG BARU
Selanjutnya disebut pihak pertama

NAMA : H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

JABATAN : BUPATI BANJAR
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI BANJAR



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Pihak Pertama
CAMAT BERUNTUNG BARU



WAHIDIN NOOR, M.MPd.
Penata Tk. I
NIP.19710815 199506 1001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	90

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.389.852.814
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 35.309.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 33.583.300
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 16.125.000
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 152.331.400
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 20.106.000

Martapura, 2 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI BANJAR



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Pihak Pertama
CAMAT BERUNTUNG BARU



WAHIDIN NOOR, M.MPd.
Penata Tk. I
NIP.19710815 199506 1001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ZULKIFLI, SP
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR. MM.Pd
Jabatan : CAMAT BERUNTUNG BARU

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 02 Januari 2024

**Pihak Kedua
Camat,**


WAHIDIN NOOR. MM.Pd
NIP. 19710815 199506 1001

**Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan,**


H. ZULKIFLI, S.P
NIP. 196605091986021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KECAMATAN

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum Dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan Dan Kinerja Intern Kecamatan	82

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.389.852.814,-

Martapura, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Camat,

WAHIDIN NOOR. MM.Pd
NIP. 19710815 199506 1001

Pihak Pertama
Sekretaris Kecamatan,

H.ZULKIFLI,S.P
NIP.196605091986021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BERUNTUNG BARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANG TAJUDIN NOOR,S.AP
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : Camat Beruntung Baru

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 12 Februari 2024

Pihak Kedua
Camat,


WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan,


ANANG TAJUDIN NOOR,S.AP
NIP.196902181989031007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %
1.1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90 orang
1.2	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen
2	Terselenggarakannya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pem pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %
2.1	Terselenggarakannya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen
2.2	Terselenggarakannya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen
2.3	Terselenggarakannya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen
2.4	Terselenggarakannya - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen

2.5	Terselenggarakannya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen
2.6	Terselenggarakannya Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.155.400,-
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	33.164.000,-
1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.155.400,-

2	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.106.000,-
2.1	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.634.000,-
2.2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.327.000,-
2.3	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.777.000,-
2.4	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.577.000,-
2.5	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.734.000,-
2.6	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.057.000,-

Beruntung Baru, 12 Februari 2024

Pihak Kedua
Camat,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemerintahan


WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001


ANANG TAJUDIN NOOR,S.AP
NIP.196902181989031007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATI YULIANI, S.E
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : Camat Beruntung Baru

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Camat,

WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat,

TATI YULIANI, S.E
NIP. 197507102005012012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100 %
1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 LKM
1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.583.300,-
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.162.800,-
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.420.500,-

Pihak Kedua
Camat,


WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Beruntung Baru, 02 Januari 2024

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat,


TATI YULIANI, S.E
NIP. 197507102005012012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BERUNTUNG BARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRIL ANWAR,S.P
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : Camat Beruntung Baru

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 12 Februari 2024

Pihak Kedua
Camat,

WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ,

KHAIRIL ANWAR,S.P
NIP.1971012420090111001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %
1.1	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen
2	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100%
2.1	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.012.000,-
1.2	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	88.012.000,-

2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	35.309.000,-
2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.309.000,-

Beruntung Baru, 12 Februari 2024

Pihak Kedua
Camat,



WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ,



KHAIRIL ANWAR, S.P
NIP.1971012420090111001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GAZALI RAHMAN. S.AP
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : WAHIDIN NOOR, M.MPd
Jabatan : CAMAT BERUNTUNG BARU

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban,


WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001


GAZALI RAHMAN. S.AP
NIP 19681119 200701 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

No	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%
1.1	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
1.2	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan
2	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100%
2.1	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12.968.000,-
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.161.000,-

1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.807.000,-
2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.157.000,-
2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.157.000,-

Martapura, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Camat Beruntung Baru,


WAHIDIN NOOR, M.MPd
NIP. 19710815 199506 1 001

Pihak Pertama
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban,


GAZALI RAHMAN. S.AP
NIP 19681119 200701 1 017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : H. ZULKIFLI, SP
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan Beruntung Baru,

H. ZULKIFLI, S.P
NIP. 196605091986021001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIYANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 %
2	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
3	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100 %
3.1	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit
3.2	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
6.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan
6.2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39 Dokumen

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	700.000.-
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.032.300,-
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.368.000,-

3.1	Pengadaan Mebel	10.644.000,-
3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.724.000,-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.046.916,-
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.170.000,-
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.952.646.598,-
6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.912.356.598,-
6.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.290.000,00

Martapura, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan ,



H.ZULKIFLI,S.P
NIP.196605091986021001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



M.JAUHARIANSYAH,S.M
NIP. 198002222000121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NAFIAH
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 02 januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIYANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,

MUHAMMAD NAFIAH
NIP. 197203142006041010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADMINISTRASI UMUM

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.486.916,-
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.560.000,-
	JUMLAH	142.046.916,-

Beruntung Baru, 02 januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,

MUHAMMAD NAFIAH
NIP. 197203142006041010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADERAN
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIYANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,

HADERAN
NIP. 196905232009061004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI UMUM

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit
2	Terpeliharannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit
3.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.980.000,-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.430.000,-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.760.000,-
	JUMLAH	86.170.000,-

Beruntung Baru, 02 januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


M. JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,


HADERAN
NIP. 196905232009061004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSNI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,


M. JAUHARIYANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,


HUSNI
NIP. 19710414 200906 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket
2	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
3	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
4	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.476.500.-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.629.400.-
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.126.400.-
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.800.000.-
	JUMLAH	106.032.300,-

Beruntung Baru, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,

HUSNI
NIP. 19710414 200906 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBANDRI
Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : M. JAUHARIYANSYAH, S.M
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIYANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Kepegawaian,

SUBANDRI
NIP. 197111292010011002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
2	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	700.000,-
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	30.000.000,-
	JUMLAH	30.700.000

Beruntung Baru, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,

M. JAUHARIANSYAH, S.M
NIP. 198002222000121002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Kepegawaian,

SUBANDRI
NIP. 197111292010011002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN BERUNTUNG BARU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI WARYANTI, A.Md
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : H.ZULKILI, S.P
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji pada tahun 2024 akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

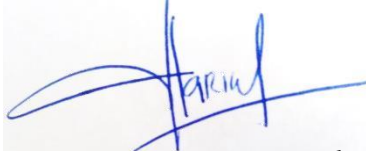
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Martapura, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan Beruntung Baru,


H.ZULKIFLI, S.P
NIP. 196605091986021001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Aset


ARI WARYANTI, A.Md
NIP 198801202015032003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET

No	SASARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100%
1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan
2	Terlaksananya Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
2.1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%
3.1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.055.000.-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.285.000.-
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.770.000.-

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	471.000.-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	471.000.-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	363.000.-
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	363.000.-

Martapura, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Kecamatan ,



H.ZULKIFLI, S.P
NIP.196605091986021001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Keuangan dan Aset



ARI WARYANTI, A.Md
NIP 198801202015032003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KECAMATAN BERUNTUNG BARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JALALUDDIN
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : ARI WARYANTI, A.Md
Jabatan : Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Beruntung Baru, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Kasubbag Perencanaan, Keuangan
dan Aset,

ARI WARYANTI, A.Md
NIP 198801202015032003

Pihak Pertama
Pengadministrasi Keuangan

JALALUDDIN
NIP. 19701030 200906 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

No	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	471.000.-
		471.000,-

Beruntung Baru, 02 Januari 2024

Pihak Kedua
Kasubbag Perencanaan, Keuangan
dan Aset,

ARI WARYANTI, A.Md
NIP 198801202015032003

Pihak Pertama
Pengadministrasi Keuangan

JALALUDDIN
NIP. 19701030 200906 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN BERUNTUNG BARU

Jl. Handil Gayar RT.004 Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru

KEPUTUSAN CAMAT BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 11a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA (IK) PADA KECAMATAN BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar ;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Beruntung Baru perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Beruntung Baru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor; 5. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 48);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BERUNTUNG BARU KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2024 KECAMATAN BERUNTUNG BARU
- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Beruntung Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Beruntung Baru Kabupaten Banjar ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beruntung Baru
pada tanggal 02 Januari 2024

CAMAT BERUNTUNG BARU



WAHIDIN NOOR, MM.Pd
Penata TK.I / III.d
NIP. 19710815 199506 1 001

Lampiran I : Keputusan Camat Beruntung Baru
 Nomor : 11.a Tahun 2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA
 KECAMATAN BERUNTUNG BARU
 TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Kecamatan merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern di Kecamatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = Σ (Unsur kinerja utama x 40%) + (Unsur kepatuhan x 30%) + (Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	SEKRETARIS KECAMATAN	Hasil Penilaian IKKI
2	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Pelimpahan Kewenangan yang dimaksud adalah meliputi koordinasi bantuan sosial, koordinasi bantuan kebencanaan dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang direncanakan x 100 %	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Penilaian Mandiri
3	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan meliputi Kegiatan PKK dan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang direncanakan x 100 %	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penilaian Mandiri
4	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan meliputi : koordinasi penyelenggaraan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban umum di kec serta Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perda dan Perkada.	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana : Total jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang direncanakan x 100 %	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Penilaian Mandiri

5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum meliputi Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Kerukunan Antar Suku Agama, Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi Pancasila dan dan pelaksanaan tugas Forkompimcan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %	KASI PEMERINTAHAN	Penilaian Mandiri
6	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan termasuk pilkades, penjangkaran perangkat desa, rakoor pembakal, pengelolaan keuangan dan aset desa, penyelenggaraan pemilihan BPD penyelenggaraan tapal batas, terfasilitasinya BKAD	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana : Total Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang direncanakan x 100 %		Penilaian Mandiri

CAMAT BERUNTUNG BARU



WAHIDIN NOOR, MM.Pd

Penata TK.1 / III.d

NIP. 19710815 199506 1 001

Lampiran II : Keputusan Camat Beruntung Baru
 Nomor : 11.a Tahun 2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA
 KECAMATAN BERUNTUNG BARU
 TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan meliputi kegiatan koordinasi bantuan sosial, koordinasi bantuan kebencanaan dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang Terlaksana : Total Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Yang direncanakan x 100 %	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Penilaian Mandiri
2	Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meliputi kegiatan PKK dan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100 %	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penilaian Mandiri
3	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi : Keg koordinasi penyelenggaraan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum di kec	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 %	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Penilaian Mandiri
4	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi kegiatan Penerapan dan Penegakkan Peraturan Perda dan Perkada.	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana : Total Penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100 %		Penilaian Mandiri
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi: Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Kerukunan Antar Suku Agama, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi Pancasila dan dan pelaksanaan tugas Forkompimcan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana : Total jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100 %	KASI PEMERINTAHAN	Penilaian Mandiri
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi: Pelaksanan MTQ,		KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Penilaian Mandiri

			Safari Ramadan dan Hari Besar Agama Islam			
8	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa, Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, dan Penataan dan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan Batas Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana : Total Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan x 100 %	KASI PEMERINTAHAN	Penilaian Mandiri
9	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun meliputi : 1. LKjIP 2. Laporan Kinerja Pertriwulan (4 Laporan) 3. Laporan RfK Bulanan (12 Laporan) 4. Laporan Renja 5. SK IKU 6. Dokumen Renstra Perubahan 7. Rencana Kerja (Renja) 8. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) 9. Perjanjian Kinerja 10. Perjanjian Kinerja Perubahan 11. Rencana Aksi 12. Rencana Aksi Perubahan 13. Tabel Keselarasan 14. Tabel Keselarasan Perubahan 15. RKA 16. RKA Perubahan 17. DPA 18. DPA Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang tersusun : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang direncanakan x 100%	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Penilaian Mandiri
10	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kecamatan meliputi Laporan LS, Laporan GU, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%		Penilaian Mandiri
11	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi Laporan BMD, Rekonsiliasi BMD	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksanakan : Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang direncanakan x 100%		Penilaian Mandiri
12	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi di Kecamatan meliputi Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Kepegawaian yang direncanakan x 100%		Penilaian Mandiri

13	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi di Kecamatan meliputi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penilaian Mandiri
14	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	Jumlah pengadaan BDM penunjang urusan daerah meliputi Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah yang direncanakan x 100 %		Penilaian Mandiri
15	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia terdiri dari Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan : Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang direncanakan x 100%		Penilaian Mandiri
16	Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara meliputi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara yang dilaksanakan : Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara yang direncanakan x 100%		Penilaian Mandiri

CAMAT BERUNTUNG BARU



WAHIDIN NOOR, MM.Pd

Penata TK.I / III.d

NIP. 19710815 199506 1 001

Lampiran III : Keputusan Camat Beruntung Baru
 Nomor : 11.a Tahun 2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA
 KECAMATAN BERUNTUNG BARU
 TAHUN 2024**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi 15 Dokumen yang terdiri dari : 1. Dokumen IKU 2. Renstra Perubahan 3. Renja 4. Renja Perubahan 5. Perjanjian Kinerja 6. Perjanjian Kinerja Perubahan 7. LKJIP 8. Rencana Aksi 9. Rencana Aksi Perubahan 10. Tabel Keselarasan 11. Tabel Keselarasan perubahan 12. RKA 13. RKA Perubahan 14. DPA 15. DPA Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam satu tahun	Pengelola Program	Penilaian Mandiri
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 20 Laporan yang meliputi : 1. Laporan Kinerja Triwulanan (4 Laporan) 2. Laporan RfK Bulanan (12 Laporan) 3. Laporan Renja (1 Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Menunjukkan Jumlah Orang per bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang per bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bendahara	Penilaian Mandiri
4	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang meliputi : Dokumen Keuangan LS dan GU yang terverifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri
5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang meliputi Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dalam satu tahun	Pengadministrasi Keuangan	Penilaian Mandiri
6	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yg meliputi : Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun dalam satu tahun	Pengelola Sarana dan Prasarana	Penilaian Mandiri

7	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang meliputi Laporan SKP	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang tersusun dalam satu tahun	Pengadministrasi Kepegawaian	Penilaian Mandiri
8	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah 3 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengikuti Bimbingan Teknis dalam satu tahun	Pengadministrasi Kepegawaian	Penilaian Mandiri
9	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan meliputi Belanja Barang Extracomp	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
10	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang meliputi Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer dan Kebersihan Kegiatan Rapat Koordinasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
11	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan meliputi Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
12	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
13	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan meliputi Lemari Besi dan Lemari Arsip Kayu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
14	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersusun dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
15	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yang meliputi penyediaan Jasa Listrik, PDAM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersusun dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
16	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan yang meliputi Jasa Tenaga Honor/Kontrak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersusun dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
17	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya yang meliputi kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
18	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara meliputi AC, Printer, Komputer, Laptop dan Peralatan Elektronik Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri
19	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi meliputi Bangunan Gedung Kantor,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dalam satu tahun	Pengadministrasi Umum	Penilaian Mandiri

			Aula dan Rumah Dinas			
20	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang meliputi Kegiatan Rembug Stunting, TKPK, PPKS, Puskesmas, BPNT, Sosialisasi Stunting, Kecamatan Sehat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tersusun dalam satu tahun	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Penilaian Mandiri
21	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa meliputi Kegiatan Pramusrenbang dan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Penilaian Mandiri
22	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan meliputi Kegiatan PKK, Kegiatan Pelatihan Pokja dan Kegiatan Fasilitas Lomba	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang tersusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri
23	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan meliputi, Kegiatan Pemilu 2024 (Pilpres, Pileg dan Pilkada) dan Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang tersusun dalam 1 tahun	Pengelola Ketentraman dan Ketertiban	Penilaian Mandiri
24	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat meliputi kegiatan FKUB Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang tersusun dalam satu tahun		
25	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi kegiatan Sosialisasi Perda Perkada	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri
26	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi Kegiatan HUT RI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri

27	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal meliputi Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten, Keg Safari Ramadhan, Peringatan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang tersusun dalam satu tahun	Pengelola Pemerintahan	Penilaian Mandiri
28	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan meliputi kegiatan Forkopimcam	Jumlah dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang tersusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri
29	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang tersusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri
30	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang tersusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri
31	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang tersusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri
32	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tersusun dalam satu tahun		
33	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tersusun dalam satu tahun		Penilaian Mandiri
34	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang meliputi kegiatan penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang terlaksana		Penilaian Mandiri


CAMAT BERUNTUNG BARU
WAHIDIN NOOR, MM.Pd
 Penata TK.I / III.d
 NIP. 19710815 199506 1 001